

THE EFFECT OF GOVERNANCE, DISCLOSURE LEVELS, AND AUDIT QUALITY TOWARD THE MAGNITUDE OF RELATED PARTY TRANSACTION

Felix

Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan
felix.250397@gmail.com

Hanna

Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan
hanna.wijaya@uph.edu

Abstract

This research is intended to get the empirical evidence related to the effect of corporate governance mechanism, related party disclosures and audit quality through related party transactions. This research is conducted by using all listed manufacturing company in Indonesian Stock Exchange from 2015 – 2017 with total sample of about 270 firm years. The result shows that the corporate governance has positive and significant effect to related party transactions which is proxied by assets and liabilities related party transactions. While related party transaction disclosures has no significant effect to the related party transactions itself. Whereas, audit quality has negative significant effect to related party transactions which is proxied by assets and liabilities related party transactions.

Keywords: *Related party transactions, corporate governance, related party disclosure, audit quality*

PENGARUH TATA KELOLA, TINGKAT PENGUNGKAPAN, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP BESARAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan, tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi, dan kualitas audit terhadap besaran transaksi pihak berelasi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 – 2017 dengan jumlah sampel sebanyak 270. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap besaran transaksi pihak berelasi yang diproksikan dengan transaksi pihak berelasi terkait aset dan liabilitas. Tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran transaksi pihak berelasi yang diproksikan dengan transaksi pihak berelasi terkait aset dan liabilitas. Sedangkan, kualitas audit terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap besaran transaksi pihak berelasi yang diproksikan dengan transaksi pihak berelasi terkait aset dan liabilitas.

Kata kunci: Besaran transaksi pihak berelasi, *corporate governance*, tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi, kualitas audit

Pendahuluan

Pada umumnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, sebagian besar jumlah saham dimiliki secara dominan oleh individu atau kelompok tertentu dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Individu atau kelompok yang memiliki jumlah saham yang dominan tersebut disebut sebagai pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas dapat memilih pihak-pihak yang akan mengisi posisi manajemen perusahaan dan juga turut andil dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Hal ini menyebabkan pemegang saham mayoritas bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai operasi perusahaan dibandingkan pemegang saham minoritas.

Permasalahan keagenan antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham pun dapat muncul karena adanya asimetri informasi. Akan tetapi, pada kasus ini, permasalahan keagenan yang cenderung terjadi antara pihak manajemen dengan pemegang saham (tipe I) bergeser menjadi permasalahan keagenan antara pihak manajemen dan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (tipe II). Hal ini karena pemegang saham mayoritas bisa mendapatkan informasi yang lebih baik dari pihak manajemen yang ditunjuknya. Dengan informasi yang dimilikinya, pemegang saham mayoritas dapat mendorong praktik-praktik yang menguntungkan diri mereka, tetapi merugikan pemegang saham minoritas. Salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi pihak berelasi untuk melakukan praktik ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas.

PSAK 7 (revisi 2010) mengenai Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi mendefinisikan pihak-pihak berelasi sebagai orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (atau yang disebut entitas pelapor). PSAK 7 (revisi 2010) juga mendefinisikan transaksi pihak berelasi sebagai suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Menurut Gordon et al. (2004), Cheung et al. (2009), serta Kohlbeck dan Mayhew (2010), transaksi pihak berelasi dapat dikategorikan menjadi transaksi pihak berelasi yang bersifat menguntungkan (*efficient RPT*) dan transaksi pihak berelasi yang bersifat merugikan (*abusive RPT*).

Transaksi pihak berelasi dianggap dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya ketika melakukan transaksi pihak berelasi, sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat. Hal ini membuat transaksi pihak berelasi menjadi bersifat positif (*efficient RPT*). Akan tetapi, transaksi pihak berelasi juga dianggap dapat menimbulkan kerugian (*abusive RPT*). *Abusive RPT* dapat dilakukan melalui *tunneling activities*. Pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan perusahaan sehingga aset perusahaan dapat dialihkan keluar untuk kepentingan para pemegang saham mayoritas. Aktivitas *tunneling* dapat merugikan pemegang saham minoritas, sehingga transaksi pihak berelasi yang dilakukan menjadi bersifat merugikan. Baik transaksi pihak berelasi yang dilakukan merupakan *efficient RPT* maupun *abusive RPT*, keduanya membentuk besaran transaksi pihak berelasi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besaran transaksi pihak berelasi. Beberapa di antaranya yaitu tata kelola, tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi, dan kualitas audit. *Good corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang diterapkan di dalam perusahaan untuk mengurangi masalah keagenan. Terdapat prinsip-prinsip *good corporate governance* yang

dapat dilakukan di dalam perusahaan, yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Jika perusahaan melakukan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik, maka tingkat abusive RPT akan menurun karena praktik abusive RPT tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Penelitian Utama dan Utama (2014) menunjukkan bahwa besaran transaksi pihak berelasi, dalam hal ini, kecenderungannya yaitu transaksi pihak berelasi yang bersifat menguntungkan (*efficient RPT*) akan meningkat jika tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi berpengaruh semakin tinggi. Besaran transaksi pihak berelasi akan tinggi karena *efficient RPT* dilaporkan di dalam laporan keuangan.

Kualitas audit biasanya diukur berdasarkan kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan tertentu. Jika kantor akuntan publik yang mengaudit adalah bagian dari Big 4, maka kualitas audit yang dihasilkan akan baik sehingga laporan keuangan yang diterbitkan juga berkualitas lebih baik. Jika suatu perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik Big 4, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih lengkap dan akurat, sehingga besaran transaksi pihak berelasi yang dilaporkan akan lebih besar.

Penelitian mengenai transaksi pihak berelasi masih jarang dilakukan di Indonesia, sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini dibuat dengan mengacu pada penelitian Utama (2015). Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah cara pengukuran tata kelola yang menggunakan penilaian skor dari empat dimensi *Good Corporate Governance*, yang terdiri dari *board of commissioners, management, audit committee, dan shareholder*. Selain itu, terdapat juga variabel lainnya yang diteliti yaitu variabel kualitas audit. Penelitian ini berkontribusi dengan mengukur tata kelola dari segi kualitasnya, tidak hanya dari segi keberadaannya, dan juga meneliti pengaruh kualitas audit terhadap besaran transaksi pihak berelasi.

Telaah Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan didefinisikan sebagai kontrak dimana pihak principal (pemilik atau pemegang saham) menunjuk orang lain yaitu agent (manajer) untuk menjalankan operasional perusahaan bagi kepentingan principal. Agent memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan principal dengan imbalan berupa fee sesuai kontrak.

Terdapat konflik yang dapat timbul dari hubungan keagenan karena perbedaan kepentingan antara principal dengan agent. Ada dua tipe konflik keagenan yang dapat muncul yaitu konflik keagenan Tipe I dan Tipe II (Ratnawati et al., 2016). Konflik keagenan Tipe I adalah masalah yang timbul antara pemilik perusahaan sebagai principal dengan manajemen sebagai agent. Konflik keagenan Tipe II adalah masalah yang timbul antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Manajemen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan tentunya memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Pemegang saham mayoritas yang memiliki pengendalian atas perusahaan juga dapat mendapatkan informasi lebih dari pihak manajemen. Hal ini menyebabkan munculnya kondisi ketidakseimbangan informasi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang disebut *asymmetric information*. Hal ini dapat memicu terjadinya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.

Signaling Theory

Signaling theory didasari atas asumsi bahwa terdapat masalah asimetri informasi. *Signaling theory* menjelaskan bahwa manajer memberikan sinyal dengan tujuan untuk mengurangi asimetri informasi (Hendrianto, 2012). Menurut Leland dan Pyle (1977) dalam Ranitasari (2017), *signaling theory* menyatakan bahwa terdapat dorongan dalam para manajer perusahaan untuk menyampaikan informasi yang baik mengenai perusahaan kepada para calon investor melalui sinyal dalam pelaporan pada laporan tahunan perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Corporate Governance

Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan mekanisme yang diterapkan di dalam perusahaan untuk meminimalisir masalah keagenan. Praktik GCG diharapkan dapat mengurangi asymmetric information (Utama, 2015). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), terdapat lima asas atau prinsip GCG yang harus dipraktikkan, yaitu: (1) Transparansi, dimana Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan saja yang diungkapkan, tetapi hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan *stakeholder* lainnya juga harus diungkapkan. (2) Akuntabilitas, dimana Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder. (3) Pertanggungjawaban, dimana Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. (4) Independensi, dimana Perusahaan harus dikelola secara independen agar organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. (5) Kewajaran, dimana Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Menurut Rezaee (2009), mekanisme *corporate governance* terdiri dari mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal dirancang untuk mengelola, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas perusahaan agar dapat menciptakan *sustainable stakeholder value*. Beberapa contoh mekanisme internal adalah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Sedangkan, mekanisme eksternal ditujukan untuk mengawasi aktivitas dan kinerja perusahaan untuk memastikan agar kepentingan pihak internal perusahaan selaras dengan pihak eksternal perusahaan. Beberapa contoh mekanisme eksternal adalah pasar modal dan pasar tenaga kerja.

Tingkat Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi

Dinyatakan di dalam PSAK 7 (revisi 2010) mengenai Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, suatu hubungan dengan pihak-pihak berelasi dapat berpengaruh terhadap laba rugi dan posisi keuangan entitas, baik ketika terjadi transaksi dengan pihak berelasi maupun ketika tidak terjadi transaksi sekalipun. Karena itu, pengetahuan mengenai transaksi, saldo, termasuk komitmen, dan hubungan entitas dengan pihak-pihak berelasi dapat mempengaruhi penilaian entitas oleh pengguna laporan keuangan, sehingga perlu adanya pengungkapan pihak-pihak berelasi.

PSAK 1 (revisi 2013) mengenai Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat

keputusan ekonomik, serta menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan diharuskan untuk menyajikan informasi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, serta arus kas mengenai entitas.

Selain itu, terdapat juga informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Rincian mengenai saldo transaksi pihak berelasi terkait dengan aset, liabilitas, penjualan, dan beban diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Menurut Peraturan OJK Nomor VIII.G7 Tahun 2000 yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan, terkait dengan proporsi transaksi pihak berelasi, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan: (1) rincian jumlah masing-masing pos aktiva, kewajiban, penjualan, dan pembelian (beban) kepada pihak berelasi beserta persentasenya terhadap total aktiva, kewajiban, penjualan, dan pembelian (beban); (2) nama dan hubungan dengan pihak berelasi apabila jumlah dari setiap transaksi atau saldo dengan pihak berelasi tertentu melebihi satu miliar rupiah; (3) penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama; (4) sifat, hubungan, jenis, dan unsur transaksi pihak berelasi; (5) kebijakan harga dan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan harga dan syarat tersebut sama dengan untuk pihak ketiga; dan (6) alasan dan dasar dilakukannya pembentukan penyisihan piutang pihak berelasi.

Kualitas Audit

Menurut DeAngelo (1981) dalam Agusti dan Pertiwi (2013), kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor menemukan dan melaporkan kesalahan atau pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan, menurut Rosnidah (2010) dalam Agusti dan Pertiwi (2013), kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar sehingga auditor dapat mengungkapkan dan melaporkan jika terjadi pelanggaran yang dilakukan klien.

Penelitian Basset et al. (2007) dalam Akmyga dan Mita (2015), menyatakan bahwa jika kualitas audit semakin baik, maka informasi keuangan yang diungkapkan akan semakin luas. Kualitas audit ditentukan dengan ukuran kantor akuntan publik yang mengaudit suatu perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik Big 4 diharapkan dapat mengungkapkan informasi keuangan yang lebih luas dibandingkan dengan kantor akuntan publik non-Big 4. Hal ini dikarenakan kantor akuntan publik Big 4 memiliki keinginan untuk melindungi reputasi mereka sendiri sehingga pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan yang mereka audit akan didorong untuk semakin luas dan transparan (Basset et al., 2007 dalam Akmyga dan Mita, 2015).

Transaksi Pihak Berelasi

Di Indonesia, perlakuan akuntansi untuk transaksi pihak berelasi diatur dalam PSAK 7 mengenai Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Menurut PSAK 7 (revisi 2010), pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). PSAK 7 (revisi 2010) juga mendefinisikan transaksi pihak berelasi sebagai suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

Gordon et al. (2004), Cheung et al. (2008), serta Kohlbeck dan Mayhew (2010) membagi transaksi pihak berelasi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama adalah transaksi pihak berelasi yang bersifat menguntungkan yaitu *efficient RPT*. Tipe yang kedua adalah transaksi pihak berelasi yang bersifat merugikan yaitu *abusive RPT*. Besaran transaksi pihak berelasi terdiri dari besaran *efficient RPT* dan besaran *abusive RPT*.

Efficient RPT diyakini dapat meningkatkan efisiensi perusahaan karena transaksi pihak berelasi ini dapat mengurangi biaya transaksi. Transaksi yang dilakukan antara dua pihak di bawah kontrol yang sama dapat menjadi lebih mudah. Biaya untuk kontrak dapat menjadi lebih rendah dan proses negosiasi dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan jika dengan pihak ketiga. Tipe transaksi pihak berelasi ini cenderung meningkatkan kekayaan pemegang saham.

Abusive RPT dilakukan oleh pemegang saham pengendali atau mayoritas untuk melakukan praktik ekspropriasi terhadap pemegang saham non-pengendali atau minoritas. *Abusive* RPT dapat dilakukan melalui aktivitas tunneling. Pemegang saham pengendali mengekspropriasi pemegang saham minoritas dengan cara mentransfer sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham pengendali melalui *self-dealing transactions* (Djankov et al., 2008). Tipe transaksi pihak berelasi ini cenderung membahayakan kekayaan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.

Pengaruh Corporate Governance terhadap Besaran Transaksi Pihak Berelasi

Mekanisme *corporate governance* dapat melindungi pemegang saham minoritas dari praktik-praktik ekspropriasi. Transaksi pihak berelasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan praktik ekspropriasi. Dengan adanya mekanisme *corporate governance* yang baik, maka praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip *good corporate governance* seperti praktik ekspropriasi yang dilakukan melalui transaksi pihak berelasi dapat diminimalisir.

Menurut Gordon (2004), praktik transaksi pihak berelasi yang merugikan pemegang saham dapat dicegah dengan adanya mekanisme *corporate governance*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin kuat mekanisme *corporate governance* yang dilakukan, maka semakin rendah jumlah *abusive* RPT. Selain itu, hasil penelitian Utama dan Utama (2014) juga menemukan bahwa praktik *corporate governance* yang semakin baik akan semakin menekan besaran *abusive* RPT.

Besaran transaksi pihak berelasi terdiri dari *abusive* RPT dan *efficient* RPT. Mekanisme *corporate governance* yang baik dapat menekan praktik *abusive* RPT tetapi tidak akan mengurangi *efficient* RPT yang dilakukan perusahaan karena *efficient* RPT bersifat menguntungkan bagi perusahaan. Maka dari itu, hipotesis pertama untuk penelitian ini adalah:

H₁: Mekanisme corporate governance berpengaruh negatif signifikan terhadap besaran transaksi pihak berelasi.

Pengaruh Tingkat Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi terhadap Besaran Transaksi Pihak Berelasi

Semakin tinggi tingkat pengungkapan, maka transparansi dari laporan keuangan akan semakin meningkat. Dalam penelitian Utama (2015) disebutkan bahwa hasil penelitian Hwang et al. (2010) menemukan bahwa jika transparansi perusahaan semakin tinggi, maka kecenderungan terjadi *abusive* RPT semakin rendah. Tingkat pengungkapan yang tinggi mensinyalir bahwa transaksi pihak berelasi yang dilakukan perusahaan kecenderungannya adalah *efficient* RPT.

Hasil penelitian Utama dan Utama (2014) menemukan bahwa perusahaan yang tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasinya tinggi akan meningkatkan besaran transaksi pihak berelasi, dimana transaksi pihak berelasi yang diungkapkan cenderung bersifat *efficient*. Sedangkan, hasil penelitian Utama (2015) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap besaran transaksi pihak berelasi. Transaksi pihak berelasi yang didominasi *efficient* RPT akan lebih tinggi tingkat pengungkapannya sehingga

besaran transaksi pihak berelasi juga akan meningkat. Maka dari itu, hipotesis kedua untuk penelitian ini adalah:

H₂: Tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi berpengaruh positif signifikan terhadap besaran transaksi pihak berelasi.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Besaran Transaksi Pihak Berelasi

Hasil penelitian Bennouri et al. (2015) menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik Big 4 melaporkan jumlah transaksi pihak berelasi yang lebih sedikit. Kualitas audit umumnya diasosiasikan dengan reputasi kantor akuntan publik. Bennouri et al. (2015) berargumen bahwa hubungan negatif antara kantor akuntan publik Big 4 dengan pelaporan transaksi pihak berelasi timbul karena adanya accounting uncertainty dalam pelaporan transaksi pihak berelasi.

Jika kualitas audit semakin baik, maka kualitas laporan keuangan yang dilaporkan akan semakin meningkat. Laporan keuangan harus dapat memberikan informasi keuangan yang berkualitas tinggi. Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), salah satu karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna adalah representasi tepat. Tiga karakteristik yang harus dimiliki dari informasi keuangan yang menunjukkan representasi tepat adalah lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Laporan keuangan yang sudah diaudit dengan baik tentu akan semakin memberikan informasi keuangan yang tepat, lebih lengkap dan netral, juga terbebas dari kesalahan material, sehingga besaran transaksi pihak berelasi yang dilaporkan akan lebih dapat diandalkan. Maka dari itu, hipotesis ketiga untuk penelitian ini adalah:

H₃: Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap besaran transaksi pihak berelasi.

Research Method (Metodologi Penelitian)

Penelitian ini menggunakan 270 sampel penelitian yang telah melewati *purposive sampling* sebelumnya dengan kriteria perusahaan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2017 dan memiliki transaksi dengan pihak berelasi serta memiliki data keuangan yang memadai untuk penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen terkait yang tersedia. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa annual report dan laporan keuangan tahunan dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 – 2017. Data-data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Model regresi berganda digunakan dalam penelitian ini dengan model empiris sebagai berikut:

$$RPTAL_{it} = \alpha + \beta_1 CG_{it} + \beta_2 DISCL_{RPT_{it}} + \beta_3 KLA_{it} + \beta_4 MC_{it} + \beta_5 LEV_{it} + \epsilon$$

Keterangan:

$RPTAL_{it}$: Transaksi pihak berelasi perusahaan i pada tahun t yang terkait dengan akun aset dan liabilitas. Dihitung dengan membagi jumlah RPT *asset* dan RPT *liabilities* dengan ekuitas

α : konstanta

β : koefisien regresi

CG_{it}	: <i>Corporate governance</i> (tata kelola) perusahaan i pada tahun t , dihitung dengan skoring dimana setiap dimensi diberikan pembobotan, yang didasarkan dari penelitian Wahidahwati (2012), yaitu 45% untuk board of commissioner, 20% untuk audit committee, 20% untuk <i>management</i> , dan 15% untuk shareholder. Nilai akhir penilaian CG untuk setiap perusahaan adalah total dari nilai setiap dimensi yang sudah dibobotkan sesuai dengan bobotnya masing-masing.
$DISCL_{RPTit}$: Tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi perusahaan i pada tahun t , diukur berdasarkan enam hal yang harus diungkapkan menurut Peraturan OJK Nomor VIII.G.7 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
KLA_{it}	: Kualitas audit perusahaan i pada tahun t berdasarkan kategori kantor akuntan public. Jika perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik Big 4 maka akan diberikan nilai 1 dan jika diaudit oleh kantor akuntan publik non-Big 4 maka akan diberikan nilai 0.
MC_{it}	: <i>Market capitalization</i> (kapitalisasi pasar) perusahaan i pada tahun t
LEV_{it}	: <i>Leverage</i> perusahaan i pada tahun t
ε	: <i>error</i>

Data diolah dengan menggunakan SPSS 25 dimana sebelumnya telah memenuhi uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Analisis uji F dilakukan untuk melihat apakah model empiris penelitian sudah fit atau layak. Analisis dilakukan dengan melihat nilai sig. model empiris penelitian dari tabel ANOVA. Jika nilai sig. $< 0,10$ maka model dapat dinyatakan layak atau fit.

Tabel 1
ANOVA

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	29,006	5	5,801	33,914	0,000
Residual	45,159	264	0,171		
Total	74,166	269			

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 1, dapat dilihat bahwa model empiris penelitian dapat dinyatakan layak atau *fit* karena memiliki nilai sig. $0,000 < 0,10$.

Tabel 2
Hasil Uji Adjusted R²

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,625	0,391	0,380	0,4135918

Uji Adjusted R² dilakukan untuk mengukur kemampuan model empiris penelitian untuk menerangkan variasi variabel dependen. Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa Adjusted R² memiliki nilai sebesar 0,380 yang berarti model empiris penelitian mampu menerangkan sebesar 38% dari variasi variabel dependen, sedangkan sebesar 62% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model empiris penelitian.

Analisis uji t dilakukan dengan melihat nilai sig. dari setiap variabel independen dan variabel kontrol dalam model persamaan regresi. Jika variabel independen atau variabel kontrol

memiliki nilai sig < 0,10 maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 3
Hasil Uji t (one-tail)

	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
(Constant)	0,440	1,119	0,132
CG	0,035	1,673	**0,048
DISCL _{RPT}	0,060	0,398	0,346
KLA	-0,171	-1,851	**0,033
MC	-0,028	-1,907	**0,029
LEV	0,227	11,812	*0,000

*signifikan pada $\alpha = 1\%$

**signifikan pada $\alpha = 5\%$

Pembahasan dan Analisis Hasil

Hipotesis pertama untuk penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap besaran transaksi pihak berelasi. Berdasarkan hasil regresi, ditemukan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan positif terhadap besaran transaksi pihak berelasi sehingga hipotesis pertama untuk penelitian ini ditolak. Hal ini berarti semakin tinggi mekanisme *corporate governance* suatu perusahaan, maka besaran transaksi pihak berelasi akan semakin tinggi. Hal ini berlawanan dengan hasil penelitian Gordon et al. (2004) dan Utama dan Utama (2014) yang menemukan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap besaran transaksi pihak berelasi. Mekanisme *corporate governance* diduga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *efficient RPT* yang dapat menguntungkan perusahaan, sehingga jika mekanisme *corporate governance* perusahaan semakin baik, perusahaan akan semakin banyak melakukan transaksi pihak berelasi yang bersifat *efficient*.

Hipotesis kedua untuk penelitian ini adalah tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap besaran transaksi pihak berelasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap besaran transaksi pihak berelasi. Hal ini diduga karena pengukuran besaran transaksi pihak berelasi yang menggunakan transaksi pihak berelasi terkait aset dan liabilitas. Hasil penelitian sebelumnya (Utama, 2015) menemukan bahwa tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi yang terkait dengan akun sales dan *expenses* (RPTSE), tetapi tidak berpengaruh terhadap transaksi pihak berelasi yang terkait dengan aset dan liabilitas (RPTAL). Berdasarkan argumentasi Utama (2015), tingkat pengungkapan pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap RPTAL karena RPTAL yang bersifat *efficient* tidak mendominasi RPTAL yang bersifat *abusive*.

Hipotesis ketiga untuk penelitian ini adalah kualitas audit berpengaruh positif terhadap besaran transaksi pihak berelasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap besaran transaksi pihak berelasi sehingga hipotesis ketiga untuk penelitian ini ditolak. Kualitas audit yang diukur berdasarkan kantor akuntan publik Big 4 atau non-Big 4. Kantor akuntan publik Big 4 diasosiasikan dengan besaran transaksi pihak berelasi yang

lebih rendah dibandingkan kantor akuntan publik non-Big 4. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Bennouri et al. (2015), dimana perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik Big 4 melaporkan besaran transaksi pihak berelasi yang lebih sedikit. Hal ini dapat disebabkan karena kantor akuntan publik Big 4 akan menyaring klien auditnya dengan melakukan *risk assessment*.

Penelitian Kohlbeck dan Mayhew (2010) menemukan bahwa pasar finansial memiliki penilaian negatif terhadap perusahaan yang mengungkapkan transaksi pihak berelasi. Maka, untuk mengurangi risiko dan melindungi reputasinya, kantor akuntan publik Big 4 mungkin cenderung akan menolak calon klien yang banyak melakukan transaksi pihak berelasi (Bennouri et al., 2015) sehingga kualitas audit berpengaruh negatif terhadap besaran transaksi pihak berelasi. Selain itu, dapat dilihat juga dari analisis statistik deskriptif bahwa dari 270 data sampel, hanya sebanyak 39% dari data sampel yang diaudit oleh kantor akuntan publik Big 4. Lebih banyak data sampel yang diaudit oleh kantor akuntan publik non-Big 4 (sebanyak 166 data sampel) dibandingkan yang diaudit oleh kantor akuntan publik Big 4 (sebanyak 104 data sampel), sehingga hal ini mungkin dapat menjelaskan asosiasi negatif antara kantor akuntan publik Big 4 dengan besaran transaksi pihak berelasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa, variabel tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan scoring atas mekanisme *good corporate governance* terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap besaran transaksi pihak berelasi. Mekanisme *corporate governance* perusahaan yang baik diduga akan mendorong dilakukannya transaksi pihak berelasi yang bersifat menguntungkan bagi perusahaan (*efficient RPT*) sehingga akan meningkatkan besaran transaksi pihak berelasi. Variabel tingkat pengungkapan yang diproksikan dengan persentase pengungkapan yang dilakukan perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran transaksi pihak berelasi. Hasil ini diduga karena variabel besaran transaksi pihak berelasi diproksikan dengan transaksi pihak berelasi yang terkait dengan aset dan liabilitas (RPTAL), bukan dengan transaksi pihak berelasi yang terkait dengan *sales dan expenses* (RPTSE), tetapi. Pada penelitian sebelumnya (Utama, 2015), ditemukan bahwa tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan terhadap RPTAL tetapi berpengaruh signifikan terhadap RPTSE. Tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap RPTAL karena RPTAL yang bersifat *efficient* tidak mendominasi RPTAL yang bersifat *abusive*. Variabel kualitas audit yang diproksikan dengan berdasarkan kategori diaudit oleh kantor akuntan publik Big 4 atau non-Big 4 terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap besaran transaksi pihak berelasi. Kantor akuntan publik Big 4 diduga cenderung akan menolak calon klien yang melakukan banyak transaksi pihak berelasi untuk melindungi reputasinya (Bennouri et al., 2015). Oleh karena itu, ketika perusahaan memiliki kualitas audit yang baik (diaudit oleh kantor akuntan publik Big 4), maka besaran transaksi pihak berelasinya akan lebih rendah.

Daftar Pustaka

- Agusti, R., & Pertiwi, N. P. (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Sumatera). *Jurnal Ekonomi* 21 (3), 1-13.
- Akmyga, S. F., & Mita, A. F. (2015). Pengaruh Struktur Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12 (1), 19-36.
- Arifah, D. A. (2012). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Intellectual Capital: pada Perusahaan IC Intensive. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9 (2), 189-211.
- Asna, H. A. (2017). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2012). *Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- Bennouri, M., Nekhili, M., & Touron, P. (2015). Does Auditor Reputation “Discourage” Related-Party Transactions? The French Case. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 34 (4), 1-32.
- Cheung, Y. L., Jing, L., Lu, T., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2008). *Tunneling and Propping Up: An Analysis of Related Party Transactions by Chinese Listed Companies*.
- Dewi, N. A. C. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik Ekspropriasi di Indonesia (Studi pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3 (1), 1-20.
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2008). The Law and Economics of Self-dealing. *Journal of Financial Economics*, 88, 430-465.
- Dyanty, V., Utama, S., Rossieta, H., & Veronica, S. (2013). Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir, Kepemilikan Keluarga serta Praktek Corporate Governance terhadap Transaksi Pihak Berelasi dan Kualitas Laba. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, 213-247.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gordon, E. A., Henry, E., & Palia, D. (2004). *Related Pary Transactions: Associations with Corporate Governance and Firm Value*.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics (Fourth Edition)*. USA: Tata McGraw Hill.

- Hapsoro, D., & Fadhillah, A. F. (2017). Relationship Analysis of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Disclosure and Economic Consequences: Empirical Study of Indonesia Capital Market. *The South East Asian Journal of Management*, 11 (2), 164-182.
- Hendrianto. (2012). Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan dan Konservatisme Akuntansi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1 (3). 62-66.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305-360.
- Kohlbeck, M., & Mayhew, B. W. (2010). Valuation of Firms that Disclose Related Party Transactions. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29, 115-137.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2000). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Ranitasari, R. R. (2017). *Pengaruh DPK, LDR, CAR, NPL, dan NIM terhadap Penyaluran Kredit pada Perusahaan Perbankan Swasta Devisa Nasional yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011-2015*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Ratnawati, V., Abdul-Hamid, M. A., & Popoola, O. M. J. (2016). The Influence of Agency Conflict Types I and II on Earnings Management. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6 (S4), 126-131.
- Rezaee, Z. (2009). *Corporate Governance and Ethics*. USA: John Wiley and Sons.
- Sambora, M. N., Handayani, S. R., & Rahayu, S. M. (2014). Pengaruh Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8 (1), 1-10.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (Seventh Edition)*. UK: John Wiley and Sons.
- Sudarmadji, A.M, & Sularto, L. (2007). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT*, 2, 53-61.

- Sukandar, P. P. (2014). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (3), 1-7.
- Utama, C. A. (2015). Penentu Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12 (1), 37-54.
- Utama, C. A., & Utama, S. (2014). Corporate Governance, Size and Disclosure of Related Party Transactions, and Firm Value: Indonesia Evidence. *International Journal of Disclosure and Governance*, 11 (4), 341-365.
- Wahidahwati. (2012). The Influence of Financial Policies on Earnings Management, Moderated by Good Corporate Governance. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 16 (4),50